

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, UKURAN
PEMERINTAH DAERAH, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN BELANJA
MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia
Tahun 2019-2022)**

SKRIPSI



**OLEH
CAHYA GITA PAWESTRI
19210261M**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SURAKARTA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN

**PENGARUH INTERGOVERNMENTAL REVENUE, UKURAN PEMERINTAH DAERAH,
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2022)**

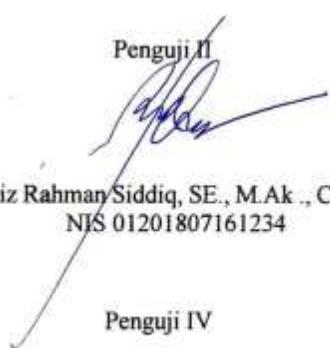
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Skripsi Fakultas Bisnis Universitas Setia Budi pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Februari 2025

Penguji I


Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si.
NIS 01200504012113

Penguji II


Faiz Rahman Siddiq, SE., M.Ak., CDM
NIS 01201807161234

Penguji III


Yunus Harjito, SE., M.Si
NIS 01201509161199

Penguji IV

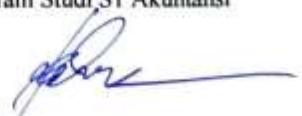

Sugiarti, SE., M.Sc., M.Ak
NIS 01200807162127

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Didik Setyawan, S.E., M.M., M.Sc., CDM
NIS 01200807161126

Ketua Program Studi S1 Akuntansi


Faiz Rahman Siddiq, SE., M.Ak., CDM
NIS 01201807161234

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH INTERGOVERNMENTAL REVENUE, UKURAN PEMERINTAH DAERAH,
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2022)**

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang ujian Skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Februari 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Sugiarti, SE., M.Sc., M.Ak
NIS : 01200807162127



Yunus Harjito, SE., M.Si
NIS : 01201509161199

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Faiz Rahman Siddiq, SE., M.Ak., CDM
01201807161234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Surakarta, 25 Februari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cahya Gita Pawestri', enclosed within a circular scribble.

Cahya Gita Pawestri
NIM: 19210261M

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar dan janganlah orang-orang yang tidak yakin meremehkan (janji-Nya)

(QS. Ar-Rum: 60)

Tidak ada mimpi yang terlalu besar dan tidak ada pemimpi yang terlalu kecil

(Turbo)

Cobalah dulu, baru cerita. Pahami dulu, baru menjawab. Pikirkan dulu, baru berkata. Dengarkan dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap.

(Socrates)

Keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan.

Kemampuan bisa diasah, kesempatan bisa dicari, jadi keberuntungan pada dasarnya bisa diciptakan

(Dzawin Nur)

Fortis Fortuna Adiuvat (Keberuntungan Berpihak pada yang Berani)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini kupersembahkan kepada keluarga terutama bapak dan ibu yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan selalu mendoakan tiada henti. Semua teman seperjuangan S1 Akuntansi 2021 terutama teman-teman satu kelas yang selalu memberikan dukungan satu sama lain, serta alamaterku Universitas Setia Budi.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sebagai rasa syukur atas segala karunia, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada seluruh umat Islam.

Penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2022)”** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi mata kuliah skripsi pada program S1 Akuntansi di Fakultas Bisnis Universitas Setia Budi Surakarta.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, petunjuk, kemudahan yang tiada henti kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas segala kenikmatan dan kasih sayang-Nya yang diberikan kepada penulis.
2. Dr. Ir. Djoni Tarigan., MBA. selaku rektor Universitas Setia Budi Surakarta.
3. Dr. Didik Setyawan, SE., MM., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Setia Budi Surakarta.
4. Faiz Rahman Siddiq, SE, M.Ak. selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi serta jajaran staff pengajar Prodi Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu.
5. Sugiarti, SE., M.Sc., M.Ak dan Yunus Harjito, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih banyak ibu dan bapak, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta atas semua motivasi, saran dan nasihat serta ilmu yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Bisnis Universitas Setia Budi, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Setia Budi Surakarta.
7. Teruntuk cinta pertama penulis, *support system* terbaik dan panutanku Ayahanda Kusnanto, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis,

berkorban keringat, tenaga dan pikiran sampai berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.

8. Bidadari surgaku Ibunda Wiyanti, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya kepada penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku kuliah, namun beliau mampu mendidik dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Adikku tersayang Cahya Aditya Putri, terimakasih atas doa dan dukungannya yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
10. Kepada seluruh teman dekat penulis Lestari, Femindia Alfita Prihanani, dan Arahma Handayani yang senantiasa memberikan dukungan untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
11. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi 2021, terimakasih telah menjadi keluarga yang menemani serta saling bekerjasama menyelesaikan skripsi.
12. Kepada seseorang yang belum bisa penulis sebut namanya yang sedang berjuang menggapai mimpinya, terimakasih sudah selalu memberikan dukungan untuk penulis, terimakasih sudah selaaui siap meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis, dan terimakasih sudah menjadi salah satu alasan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri terimakasih telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam hal apapun, semoga kedepannya bisa menggapai seluruh mimpi dan harapan yang diinginkan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata penulis berharap bila skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi suatu karya yang bermanfaat bagi sesama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 25 Februari 2025



(Cahya Gita Pawestri)

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia dengan belanja modal sebagai variabel moderasi. Analisis ini menggunakan variabel bebas yaitu *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, dan pendapatan asli daerah. Variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel moderasinya yaitu belanja modal. Sampel penelitian ini yaitu pemerintah provinsi di Indonesia periode 2019-2022 terdiri dari 34 provinsi. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, metode analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal memoderasi memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of intergovernmental revenue, local government size, and regional original revenue on the financial performance of provincial regional governments in Indonesia, with capital expenditure as a moderating variable. The analysis uses independent variables, namely intergovernmental revenue, local government size, and regional original revenue. The dependent variable is the financial performance of the regional government, while the moderating variable is capital expenditure. The sample in this study consists of provincial governments in Indonesia for the period 2019-2022, covering 34 provinces. Data collection was done using secondary data, and the analysis method used is multiple regression analysis. The results of the study show that the intergovernmental revenue variable has a positive effect on the financial performance of regional governments, while the local government size and regional original revenue variables also have a positive effect on the financial performance of regional governments. Capital expenditure moderates and strengthens the effect of regional original revenue on the financial performance of regional governments.

Keywords: *Regional Government Financial Performance, Intergovernmental Revenue, Local Government Size, Regional Original Revenue, and Capital Expenditure.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Teori <i>Stewardship</i>	9
2.1.2. Teori <i>Stakeholder</i>	10
2.2. Variabel Dependen.....	10
2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah	10
2.3. Variabel Independen	13
2.3.1. Intergovernmental Revenue	13
2.3.2. Ukuran Pemerintah Daerah	16
2.3.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	17
2.4. Variabel Moderasi.....	19
2.4.1. Belanja Modal	19
2.5. Pengembangan Hipotesis	21
2.5.1. Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
2.5.2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	22
2.5.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	23

2.5.4.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dimoderasi Oleh Belanja Modal	24
2.6.	Model Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN.....		27
3.1.	Desain dan Jenis Penelitian.....	27
3.2.	Populasi dan Sampel	27
3.2.1.	Populasi	27
3.2.2.	Sampel.....	28
3.3.	Definisi Operasional Variabel.....	28
3.3.1.	Variabel Dependen (Y)	28
3.3.2.	Variabel Independent (X).....	29
3.3.3.	Variabel Moderasi (Z).....	30
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5.	Teknik Analisis Data.....	31
3.5.1.	Analisis Statistik Deskriptif	31
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik.....	32
3.5.3.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	33
3.5.4.	Moderated Regression Analysis (MRA)	34
3.5.5.	Pengujian Hipotesis.....	34
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		36
4.1.	Deskripsi Sampel	36
4.2.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	36
4.3.	Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik	38
4.3.1.	Uji Normalitas	38
4.3.2.	Uji Multikolinearitas	39
4.3.3.	Uji Heteroskedastisitas	39
4.3.4.	Uji Autokorelasi	40
4.4.	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	40
4.5.	Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	41
4.6.	Hasil Uji Kelayakan Model.....	43
4.6.1.	Koefisien Determinasi (R^2)	43
4.6.2.	Signifikansi Data (Uji F).....	43
4.6.3.	Uji Parsial (Uji t).....	44
4.7.	Pembahasan.....	45
4.7.1.	<i>Intergovernmental Revenue</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	45

4.7.2.	Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	46
4.7.3.	Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	47
4.7.4.	Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	48
BAB V PENUTUP		50
5.1.	Kesimpulan	50
5.2.	Keterbatasan Penelitian.....	50
5.3.	Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA		52
LAMPIRAN		59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2022	4
Tabel 2.1 Model Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	12
Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel	36
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	37
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>	37
Tabel 4.4 Nilai <i>Tolerance</i> dan VIF.....	39
Tabel 4.5 Nilai Uji Heteroskedastisitas	39
Tabel 4.6 Nilai Uji Autokorelasi	40
Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis dengan Regresi Linier Berganda.....	40
Tabel 4.8 Hasil Uji Persamaan MRA ke-1	42
Tabel 4.9 Hasil Uji Persamaan MRA ke-2.....	42
Tabel 4. 10 Hasil Uji Persamaan MRA ke-3	42
Tabel 4.11 Nilai Uji Koefisien Determinasi PAD.....	42
Tabel 4.12 Nilai Uji Koefisien Determinasi PAD, BM, dan PAD*BM.....	42
Tabel 4.13 Nilai Uji Koefisien Determinasi.....	43
Tabel 4.14 Nilai Uji Signifikansi Data	44
Tabel 4.15 Nilai Uji Hipotesis secara parsial <i>t-test</i>	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	26
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	59
Lampiran 2 Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik	59
Lampiran 3 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	60
Lampiran 4 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	60
Lampiran 5 Hasil Uji Kelayakan Model.....	61
Lampiran 6 Daftar Provinsi di Indonesia periode 2019-2022	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan untuk mendapatkan otonomi provinsi yang lebih besar, nyata, dan bertanggung jawab telah meningkat selama era reformasi. Dengan memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, reformasi Indonesia mengubah struktur kehidupan negara. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, amandemen kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dituntut memiliki sumber daya fiskal yang memadai. Undang-undang ini memberi mereka kewenangan untuk mengelola dan mengatur berbagai urusan pemerintahan yang berada di luar kewenangan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah, merupakan bagian penting dari struktur pemerintahan negara, berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dan layanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat membiayai operasional pemerintah secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Untuk mencapai tujuan ini, pendapatan daerah harus dialokasikan untuk membantu pemerintah daerah beroperasi, dan pengelolaan keuangan daerah juga membutuhkan dukungan yang memadai. Beberapa wilayah memiliki potensi pendapatan asli daerah yang tinggi, sementara yang lain belum memilikinya. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki otoritas untuk memberikan dana *intergovernmental* kepada setiap daerah di Indonesia untuk memastikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki keseimbangan keuangan.

Intergovernmental revenue di Indonesia rata-rata mewakili 80 persen dari penerimaan daerah (Andirfa dkk, 2016). Jika realisasi pendapatan asli daerah lebih rendah daripada belanja daerah, akan ada defisit. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mendapatkan dana dari *intergovernmental revenue* dari pemerintah pusat untuk mengisi kekurangan belanja daerah. Namun, pada kenyataannya, seringkali tidak mencapai 80 persen, karena persentase alokasi dapat diubah sesuai dengan kondisi keuangan lokal. *Intergovernmental revenue* adalah dana yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendanai operasi pemerintah daerah.

Intergovernmental revenue, di sisi lain, digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan alokasi serta petunjuk anggaran yang

ditetapkan oleh undang-undang (Dasmar, 2020). Ini mencakup dana perimbangan atau dana yang dialokasikan antar pemerintah. Pemerintah akan mengawasi penggunaan dana perimbangan untuk mendorong pemerintah daerah untuk berkinerja lebih baik. Kinerja pemerintah daerah diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan ketergantungan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Di Indonesia, aturan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diterapkan, menghasilkan otoritas yang begitu besar diberikan kepada daerah. Akibatnya, ini memengaruhi pembiayaan. Untuk mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, daerah memerlukan dana pusat. Dana daerah digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat lokal melalui pendapatan asli daerah. Mungkin salah satu masalah dengan otonomi dan desentralisasi keuangan daerah adalah tingkat ketergantungan yang tinggi pada pemerintah daerah Indonesia (Antara, 2014).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan sangat krusial bagi suatu wilayah, sebab dana ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjalankan roda pemerintahan (Andirfa et al., 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PAD dimaknai sebagai total kekayaan bersih yang didapatkan dari beragam sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan sumber-sumber pendapatan sah lainnya. Seiring berjalannya waktu, PAD telah menjadi indikator penting untuk menilai kekuatan keuangan suatu daerah. Kenaikan PAD setiap tahun menjadi salah satu kriteria dalam menilai kemandirian daerah. Oleh sebab itu, PAD begitu berpengaruh dalam mendefinisikan kinerja keuangan dan kemandirian suatu daerah (Liando, 2017).

Menemukan potensi dan sumber daya yang tersedia sangatlah krusial, terutama dalam hal penghasilan untuk pembiayaan. Jika suatu daerah dapat mengelola dirinya dengan baik, maka pendapatan asli daerahnya akan meningkat. Hal ini akan memungkinkan daerah tersebut untuk mencukupi kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik (Sebastiana dan Cahyo, 2016). Mengenali kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, terutama pendapatan dari pembiayaan pembangunan, adalah cara untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Pembelanjaan yang efektif menghasilkan nilai uang yang tinggi,

yang berarti penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah lebih efisien (Pratiwi, 2018)

Ukuran pemerintah daerah (UPD) ialah satu dari beberapa faktor yang berdampak terhadap kinerja keuangan, di samping faktor pendapatan. Banyaknya pemerintahan daerah yang ada mencerminkan seberapa besar atau kecil entitas tersebut. Semakin besar UPD, semakin besar pula peluang untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjalankan roda pemerintahan. Sebaliknya, UPD yang lebih kecil akan menyulitkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan operasional.

Selain itu, dalam rangka menerapkan desentralisasi, pemerintah daerah juga akan menggunakan kekayaan yang daerah punya untuk kepentingan masyarakatnya. Belanja modal merujuk pada pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama > 1 tahun, dengan tujuan memperkaya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Ini menyebabkan peningkatan belanjaan rutin. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian aset tetap, seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya, dikenal dengan istilah belanja modal (Tumbuan dkk, 2023). Pengelolaan belanja modal yang baik sangat penting karena memungkinkan pemerintah untuk mengadakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi negara.

Banyak infrastruktur dan sarana yang dibangun menunjukkan besarnya belanja modal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 menetapkan definisi belanja modal sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk membeli atau membangun aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat untuk digunakan pada program kerja pemerintah selama lebih dari satu tahun. Berbagai komponen penting dari aset tetap meliputi tanah, mesin, peralatan, jalan, irigasi, serta jaringan lainnya. Dengan pesatnya kemajuan pembangunan yang didorong oleh alokasi belanja modal, suatu daerah diharapkan mampu menjadi lebih mandiri dalam memfasilitasi dan membiayai seluruh operasionalnya. Aspek ini sangat krusial, terutama dalam konteks keuangan lokal (Darwis dan Saputra, 2014). Alokasi belanja modal akan diperuntukkan bagi proyek-proyek yang bermaksud untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi berbagai kebutuhan mereka.

Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, berdasarkan hasil pendataan rentang tahun 2018–2022, ada 34 provinsi di Indonesia. Indonesia telah melakukan kemajuan besar dalam pembangunan parasarana. Demi menggerakkan pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan, pemerintah harus membuat komitmen yang kuat terhadap pengembangan sektor ini. Banyak proyek infrastruktur telah dimulai dalam beberapa tahun terakhir dan berdampak positif pada ekonomi sosial dan kehidupan masyarakat (Setneg.go.id).

Tabel 1.1 Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2022 (Dalam Jutaan Rupiah)

Nama Daerah	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD (%)
Sumatera Barat	9.987.369	15.386.242	64,91%
Jawa Tengah	59.066.288	42.783.460	138,05%
Bali	14.072.891	10.078.503	139,63%
Kalimantan Barat	10.180.585	13.846.841	73,52%
Sulawesi Tenggara	4.939.039	11.980.154	41,22%
Maluku	2.217.313	10.111.092	21,92%
Papua	7.782.591	45.378.803	17,15%

Sumber: Data Badan Pemeriksa Keuangan RI (2024)

Tabel 1.1 di atas memperlihatkan beberapa daerah yang mewakili tiap pulau besar di Indonesia memperlihatkan tingkat kemandirian yang berbeda beda. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) yang tinggi merefleksikan taraf dependensi daerah pada bantuan eksternal yang semakin rendah. Sebaliknya, RKKD yang rendah menandakan adanya ketergantungan yang lebih besar. Selain itu, rasio ini juga mendeskripsikan sejauh mana kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Provinsi Bali sebagai daerah dengan tingkat kemandirian paling tinggi sebesar 139,63%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Bali terhadap pemenuhan retribusi dan pajak yang menjadi unsur dari pendapatan asli daerah tinggi, yang mengisyaratkan tingkat kemakmuran masyarakat Bali yang semakin tinggi.

Berbeda hal dengan pemerintah Provinsi Papua, dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian hanya sebesar 17,15% sehingga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Papua sangat rendah dibandingkan daerah lainnya, dimana Provinsi Papua masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Hal yang serupa juga terlihat di Provinsi Maluku dan Sulawesi Tenggara, dimana tingkat kemandirian kedua daerah tersebut masih dibawah 50%, sehingga masih tergolong rendah. Kemandirian keuangan daerah ialah wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini ketergantungan daerah terhadap sumber keuangan dari negara. Diharapkan bahwa otonomi daerah dapat memberikan kesempatan bagi setiap wilayah untuk meraih tingkat

kemandirian keuangan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan daerahnya (Putra dan Rivandi, 2025).

Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah pemilik pendapatan transfer yang tinggi dan pendapatan asli daerah yang tinggi mengisyaratkan daerah tersebut sudah mandiri. Sumatera Barat dan Kalimantan Barat, kedua daerah ini menunjukkan tingkat kemandirian yang baik, hal tersebut terlihat dari tingkat kemandirian kedua daerah tersebut sudah di atas 50%. Perihal ini sanggup menjadi acuan untuk daerah lain untuk menciptakan keseimbangan yang sehat. Dapat disimpulkan bahwa beberapa daerah dinilai sudah cukup mandiri untuk membiayai operasional daerahnya seperti pada daerah Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali dan Kalimantan Barat. Namun, masih terdapat sejumlah wilayah yang amat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran operasional seperti Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Oleh karena itu, demi mencapai kemandirian, daerah perlu untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Dengan pendekatan yang tepat dan fokus pada peningkatan pendapatan asli, daerah dapat meraih kemandirian yang lebih baik di masa depan.

Sari (2016) menjalankan sebuah penelitian yang mengeksplorasi dampak *intergovernmental revenue* terhadap pemerintah daerah di berbagai kota dan kabupaten di Pulau Sumatera. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja daerah dipengaruhi oleh *intergovernmental revenue*, yang berarti bahwa semakin banyak *intergovernmental revenue* yang diterima oleh pemerintah daerah, semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut. Namun, hasil penelitian ini berlawanan dengan temuan yang diungkapkan oleh Mulyani dan Wibowo (2017). Mereka menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan semakin besar *intergovernmental revenue*, semakin buruk kinerja daerah tersebut, karena ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat.

Penelitian sebelumnya oleh Indah (2016) menunjukkan PAD dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya, kinerja akan meningkat bertepatan dengan peningkatan PAD. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ajeng pada tahun 2019 di Jawa Barat mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah di wilayah tersebut dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Hal ini serupa dengan pernyataan Sri dan Hardiyanto (2017) yang juga menegaskan bahwa

pendapatan asli daerah berdampak pada kinerja keuangan pemerintah setempat. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Sealys (2021) menunjukkan bahwa PAD memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuan ini pun sepaham dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Verawaty dan rekan-rekannya pada tahun 2020, yang menegaskan bahwa PAD berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Indah (2016), UPD memiliki dampak positif terhadap kinerja daerah. Artinya, semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin baik pula kinerja keuangannya. Temuan ini serupa dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Tama (2018) dan Masdianti (2016) di Provinsi Bali, yang juga menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. Namun, hasil penelitian oleh Maulina dkk. (2021) menunjukkan keadaan yang berbeda, di mana mereka menemukan bahwa kinerja keuangan daerah tak dipengaruhi ukuran pemerintah daerah. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan meskipun ukuran pemerintah daerah meningkat, hal ini tidak selalu berimplikasi atas peningkatan kinerja keuangan. Selain itu, Sri dan Hardiyanto (2017) menegaskan UPD memang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hajar et al. (2024) mengungkapkan bahwa belanja modal memiliki potensi untuk memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja keuangan daerah. Kenaikan PAD mampu mendorong perbaikan dalam kinerja keuangan daerah. Namun, situasinya berbeda di Provinsi NTT, di mana PAD sebagian besar berasal dari pajak; dalam konteks ini, belanja modal tidak berfungsi untuk memoderasi pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berlandaskan perbedaan hasil observasi terdahulu yang mengindikasikan hasil yang belum konsistenserta terdapat adanya fenomena pada pemerintah kota yang sudah dijelaskan di atas sehingga penulis terdorong melakukan penelitian yang membahas tentang *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah (UPD), pendapatan asli daerah (PAD), dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul “Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel

Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2022)”.
Tahun 2019-2022)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang yang sudah disampaikan di atas, sehingga rumusan masalah yang diajukan apakah pengaruh *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2019-2022. Serta pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sehingga pertanyaan penelitian yang diajukan ialah:

1. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia?
4. Apakah belanja modal memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka tujuan dilakukan penelitian ini ialah:

1. Untuk menguji pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang dimoderasi oleh belanja modal.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan, diharapkan memberikan manfaat sebagaimana berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran dalam perkuliahan akuntansi yang berbasis ilmu pengetahuan. Selanjutnya, hasil penelitian juga diharapkan mampu dijadikan referensi bagi penelitian lain yang akan mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. **Manfaat Praktis**

Penulis berharap, hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah provinsi di Indonesia dalam melakukan evaluasi terhadap rasio analisis keuangan. Terutama, rasio kemandirian dapat dijadikan saatu dari beberapa indikator vital dalam menilai kinerja keuangan pemerintah provinsi.